

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Batanghari

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665812-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601119-17012024150059

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

gifsongultom1786@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-17 15:00:59



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl Slamet Riyadi No 5A Broni Jambi

Nomor Telepon : 741671232

Penjelasan Umum : Perkembangan Industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan makin kompleksnya kegiatan usaha Bank terkhusus BPR Batanghari yang meningkatkan ekspour risiko Bank. palagi saat ini sudah menggunakan sistem digitalisasi ,Tata Kelola atau Good Corporate Governance (Gcg) pada industri perbankan menjadi penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. dalam rangka meningkatkan kinerja Bank BPR Batanghari ,melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan,Bank BPR Batanghari konsisten dan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip Tata kelola (Gcg). Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Batanghari : 1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata kelola dalam segala operasional Bank sejalan dengan Visi,Misi dan rencana strategis usaha yang ditetapkan Bank. 2. Menjaga agar kegiatan operasional Bank BPR Batanghari mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank,serta perundangan yang berlaku. 3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank Batanghari kepada stakeholders. 4. Memperbaiki budaya kerja Bank BPR Batanghari. 5. Mengelola sumber daya Bank BPR Batanghari secara lebih Amanah.6 Mendorong dan mendukung pengembangan Bank Batanghari,dengan bisa terciptanya penerapan Tata kelola yang baik pada PT BPR Batanghari maka dapat menjadi brand bahwa BPR Batanghari adalah BPR yang bisa melayani masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara baik dan transparan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	Direktur Utama	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar, keputusan rups dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Bertanggung jawab penuh untuk mengelola Bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan sesuai dengan prinsip GCG 3. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional BPR dalam mencapai maksud dan tujuan BPR secara sehat. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS .5. Menindak lanjuti temuan Audit baik eksteran maupun Interen 6. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pekerjaan para Petugas Bank. 7. Memantau dan memeriksa neraca keuangan, rugi laba serta menganalisa angka ratio kesehatan Bank dalam kaitannya dengan RBB dan anggaran yang telah ditetapkan. 8. Wajib menjalankan serta melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan ketentuan berlaku. 9. Membuat dan mempersentasikan rencana bisnis BPR setiap tahunnya untuk diusulkan kepada Dewan komisaris dan disampaikan ke OJK. 10. Bertanggung jawab terhadap perkembangan BPR setiap bulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada komisaris dan OJK. 11. Membina hubungan kerjasama yang baik antara sesama karyawan dengan sasaran untuk meningkatkan produktivitas kinerja pegawai. 12. Menetapkan wewenang Manager dan Direktur untuk memfiat maksimum biaya untuk menunjang kelancaran operasional Bank. 13. Memfiat voucher pengeluaran dan penerimaan kas sesuai limit. 14. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan rapat rapat intren, RUPS, penerimaan dan penambahan pegawai, perkembangan dan kualitas portopolio perkreditan secara keseluruhan, kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan yang telah diterapkan serta dilaksanakan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	WAHYUNI S SOS	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar, keputusan rups dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Bertanggung jawab penuh untuk mengelola Bank sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan sesuai dengan prinsip GCG. 3. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional BPR dalam mencapai maksud dan tujuan BPR secara sehat. 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS. 5. Menindak lanjuti temuan Audit baik eksteren maupun Interen. 6. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap pekerjaan para Petugas Bank. 7. Bekerjasama dengan direktur utama dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk mencapai target sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana bisnis BPR dan anggaran yang telah disusun. 8. Memonitoring dan membina pelayanan nasabah khususnya bagian pronline agar terlayani dengan baik. 9. Bertanggung jawab atas penyimpanan saldo fisik uang dalam brankas. 10. Memfiat maksimum biaya sesuai kewenangan. 11. Bertanggung jawab dalam menangani penyelesaian pengaduan nasabah pada tingkat kedua. 12. Memeriksa transaksi keuangan setiap hari kerja sesuai nota nota pendukung. 13. Membuat dan menetapkan dan mengawasi pelaksanaan SOP dibidang kredit, operasional APU dan PTT dan lainnya. 14. Meneliti sebab sebab terjadinya kredit bermasalah dan melaporkannya ke Direktur Utama. 15. Menyetujui perhitungan keringanan denda kredit sesuai limit. 16. Sebagai petugas administrator untuk laporan ke PPAK. 17. Membina SDM dalam penerapan APU dan PTT. 18. Menganalisa, memberikan pertimbangan dan masukan terhadap kebijakan SOP dan SK yang dibuat Direktur Utama. 19. Menetapkan langkah langkah untuk menjalankan fungsi kepatuhan BPR dan unit kerja. 20. Memastikan bahwa BPR telah menjalankan operasionalnya sesuai ketentuan berlaku, baik kebijakan, sistem dan SOPnya tidak ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Terkait hasil kunjungan komisaris ke lokasi jaminan CV.ATS di sarolangun, berdasar hasil temuan komisaris telah dilakukan pembahsan dengan direksi dan direksi segera menindak lanjuti terkait hal-hal yang menjadi catatan komisaris, maka direksi langsung menindaklanjuti dengan terus rutin melakukan rapat dengan pengurus CV.ATS untuk membahas dan mencari solusi untuk sumber pembayaran kredit CV ATS dan dari rapat di temukan solusi sumber pembayaran kredit hasil dari jual kaplingan tanah siap bangun, dan atas catatan- lain dari komisaris berdasarkan hasil evaluasi ditindaklanjuti direksi dan merealisasikannya secara konkrit, salah satunya membangun kerjasama dengan PT. ALPAZA untuk kredit pensiun, membuat kerjasama dan kebijakan dengan kantor PNS dan swasta untuk pnyaluran kredit dengan sistem potong gaji, mengembalikan kredit yang masih restruk covid ke POJK 33, melakukan lagkah konkrit dengan memetakan kredit bermasalah sesuai sakla prioritas untuk penyelesaian mellalui, lelang, Pengadilan, Gugatan sederhana, AYDA maupun jalan lainya dengan menggerakkan team AO dan Team PKB agar intens melakukan penyelesaian kredit, dan melakukan hapus buku, tidak lagi menyalurkan jenis kredit RK karena kredt risiko tinggi, namum jika hasil belum terlihat semua perlu waktu dalam berproses menjadi lebih baik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Semua hasil dari pengawasan dan saran ataupun jika ada rekomendasi dari komisaris terkait fungsi pengawasannya direksi segera menindaklanjuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	D Rachmad Gultom. SE	Komisaris Utama	1. Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independet. 4. Dewan komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR. 5. Dewan komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan audit Internal,OJK dan atau audit Eksteren lainnya.6.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 7. Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan. 8. Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dan Pihak lain yang dapat merugikan BPR.9. Anggota Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi
2	Elsye Adriany Silaen.SE	Komisaris	1. Dewan Komisaris bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS. 2. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. 3. Dewan komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independet. 4. Dewan komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR. 5. Dewan komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan audit Internal,OJK dan atau audit Eksteren lainnya.6.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank,kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. 7. Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan. 8. Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dan Pihak lain yang dapat merugikan BPR.9. Anggota Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang membawahi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut direksi

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Pada Tahun 2023 secara tertulis tidak ada rekomendasi komisaris kepada direksi akan tetapi dalam setiap rapat evaluasi komisaris selalu melakukan evaluasi pengawasan dan catatan kepada direksi dan manajemen demi perbaikan BPR Batanghari, diantaranya mengenai kenaikan NPL, penyelesaian kredit bermasalah, dan salah satu pemantauan komisaris terhadap kredit CV ATS dengan melakukan kunjungan ke lokasi jaminan di sarolangun pada tahun 2023, dan hasil temuan kunjungan dikoordinasikan dan dilakukan pembahasan dengan direksi untuk dicarikan solusi dan langkah-langkah, dan untuk kredit bermasalah/macet yang selalu berulang mejadi temuan OJK agar diselesaikan sehingga tdk menjadi temuan lagi ditahun2 berikutnya, mencari peluang potensi untuk pemasaran kredit, agar debitur yang hapus buku terus dilakukan penagihan dan diberikan insentif agar pegawai yang melakukan penagihan menjadi semangat, debitur yang masih dalam restrukturisasi covid 19 agar dikembalikan ke POJK 33, untuk kantor cabang dan pusat agar lebih kerja keras lagi untuk menyelesaikan kredit bermasalah di bahas, agar manager kredit/kepala cabang mendata kredit bermasalah /macet dan dibicarakan dengan stafnya dan dievaluasi dan di pol up perkembangan penyelesaiannya, dapat melakukan hapus buku sesuai ketentuan dan kebijakan kredit seperti kredit resiko tinggi, seperti kredit rekening koran yang tdk sesuai lagi agar disesuaikan /dihilangkan dan tetap harus patuh melalaukan budaya patuh, peduli risiko dan melakukan tata kelola yang baik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris dalam Tahun 2023 belum ada memberikan rekomendasi secara tertulis hanya saja memberikan saran dan pendapat terkait fungsi pengawasannya diberikan dalam bentuk surat uraian tertulis dan jika pembahasan dalam rapat untuk menjadi perhatian direksi dan manajemen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	515.000.000	8,58

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi PT.BPR Batanghari memiliki saham pada BPR Batanghari dengan nominal Rp. 515.000.000,- atau 8,58% dan tdk ada saham pada BPR lain atau perusahaan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	WAHYUNI S SOS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota direksi PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keuangan dengan direksi lain, komisaris maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	P.HASURUNGAN A MANIK SE MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	WAHYUNI S SOS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua anggota Direksi pada PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keluarga dengan sesama Direksi, Komisaris maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	D Rachmad Gultom. SE	505.000.000	8,42

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama PT BPR Batanghari yang berdomisili di Jakarta memiliki saham pada PT BPR Batanghari dengan persentase 8,42 persen dengan nominal 505 juta

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	D Rachmad Gultom. SE	PT. BPR PUSKOPAT PALEMBANG	0,06

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama PT BPR Batanghari juga memiliki saham pada PT BPR Puskopat Palembang sebesar 6 % dan juga menjabat sebagai Komisaris utama pada PT. BPR Puskopat Palembang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	D Rachmad Gultom. SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elsye Adriany Silaen.SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris PT BPR Batanghari tidak ada hubungan keuangan baik kepada sesama komisaris,direksi maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	D Rachmad Gultom. SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elsye Adriany Silaen.SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris pada PT.BPR Batanghari tidak ada hubungan keluarga dengan sesama anggota komisaris,direksi,maupun pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	324000000	2	252000000
2	Tunjangan	2	371868683	2	70562400
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		695868683		322562400

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Direksi dan komisaris adalah yang telah disetujui RUPS dan merupakan pendapatan dalam 1 tahun tidak ada pendapatan lain yang diperoleh Direksi dan komisaris diluar persetujuan RUPS didalam komponen tunjangan yang diberikan rutin setiap bulan juga termasuk tunjangan yang diberikan dalam 1 tahun 1 kali yaitu tunjangan hari raya,tunjangan perumahan bagi direksi,tunjangan pakaian dinas direksi ,Untuk tunjangan PPH dan tunjangan ponsel,air dan listrik yg diberikan setiap bulan untuk direksi ,tunjangan ponsel dan air dan listrik diberikan berupa pembayaran air listrik ditanggung BPR Batanghari sesuai ketentuan dan tidak melebihi limit yang diberikan,jika melebihi limit kekurangannya dibebankan kepada Direksi.untuk komisaris tidak diberikan tunjangan perumahan maupun pakaian dinas maupun tunjangan air listrik.yang diberikan adalah tunjangan dan honor dan atau gaji pokok setiap bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	TIDAK ADA DALAM BENTUK UNIT	TIDAK ADA
2	Transportasi	TIDAK ADA	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN	BPJS KESEHATAN
4	Fasilitas lainnya	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi dan komisaris PT BPR Batanghari tidak ada mendapat fasilitas dalam bentuk fisik baik rumah maupun kendaraan direksi diberikan tunjangan perumahan dan dalam bentuk uang dan untuk asuransi kesehatan direksi dan komisaris diikutsertakan dalam program BPJS kesehatan sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,35	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,09	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,20	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,13	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio Gaji untuk masing masing jabatan dan kedudukan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya di kantor PT BPR Batanghari baik antara gaji tertinggi dan terendah antara Direksi dan antara komisaris, antara pegawai, semua gaji diberikan kategori wajar dan tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan, semua gaji diberikan berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari yang berwenang dan perbedaan gaji juga dipertimbangkan atas jabatan dan tugas dan tanggung jawab yang diemban masa kerja dan penilaian kondite.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-08-2023	5	Rapat Evaluasi kinerja PT BPR Batanghari semester satu tahun 2023 dan rapat pengawasan Dewan komisaris tentang evaluasi RBB semester satu tahun 2023 dengan materi rapat : 1. evaluasi kinerja keuangan PT BPR Batanghari baik pusat & cabang Muara Bungo .2 Action plan penyelesaian kredit bermasalah pusat & cabang .3 untuk kredit rekening koran merupakan kredit risiko tinggi agar memperhatikan pengembalian jangka waktu kredit tersebut jika tdk layak lagi jangan diperpanjang kreditnya,target penyaluran kredit tdk tercapai agar dicari solusi atas hal ini,debitr bermasalah yang berulang kali menjadi temuan OJK agar diselesaikan,untuk penyelesaian kredit bermasalah agar extra bekerja lebih keras dan bersama staf membuat daftar2 kredit bermasalah dan di pol up penyelesaiannya,tetap melakukan penagihan terhap nasabah Hapus buku,debitur covid dikembalikan ke POJK 33,tetap menjalankan tata kelola yg baik dan kepatuhan terhadap UU
2	21-11-2023	5	Pada rapat evaluasi dewan komisaris pada bulan November Tahun 2023 tetap berfokus membahas masalah kredit bermasalah/kredit macet yang menyebabkan angka NPL semakin tinggi,agar pejabat dan staf di bagian kredit bekerja extra keras untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan memetakan sesuai skala prioritas,dan debitur yang bermasalah yang berulang kali menjadi temuan OJK harus segera selesai,aktif melakukan tagihan hapus buku,dan juga mengenai pertumbuhan kredit di BPR batanghari agar ini dicarikan pasar baru yang potensial untuk memasarkan kredit akan tetapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,dari hasil rapat evaluasi RBB dapat disimpulkan hasil kinerja belum mengembirakan walaupun sdh terlihat ada pembayaran debitur bermasalah akan tetapi belum maksimal,dari itu komisaris menekankan agar menjadi perhatian khusus mengenai penyelesaian kredit bermasalah,menaikan angka pertumbuhan kredit sehingga terjadi keseimbangan dan tingkat kesehatan Bank BPR Batanghari semakin SEHAT.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris PT BPR Batanghari melaksanakan rapat dalam tahun 2023 sebanyak 2 kali yang menjadi peserta rapat adalah dewan komsaris dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan risiko dan SKAI dan direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	D Rachmad Gultom. SE	2	0	100,00
2	Elsye Adriany Silaen.SE	2	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris PT BPR Batanghari terlaksana 2 kali selama tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Agustus dan November 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	23	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terjadi Fraud oleh pegawai PT. BPR batanghari yaitu menggunakan uang debitur saat pelunasan kredit yang yg mana saat perhitungan pelunasan terdapat kelebihan Rp 1,3jt dan uangnya tdk dikembalikan kedebitur akan tetapi digunakan 2 org pegawai BPR BH. Dan fraud yang dilakukan tidak signifikan hanya skala kecil, telah diberikan sanksi yaitu pemotongan gaji,tidak naik gaji score tdk masuk kerja selama lbh krg 2 mgu akan tetapi setelah diberikan hukuman dan sanksi pengamatan kami pegawai tersebut cukup banyak mengalami perbaikan kinerja.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	5	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Batanghari pada dasarnya tidak ada mengalami permasalahan hukum yang akibat dari ketidakpatuhan atau kesalahan dari manajemen, permasalahan hukum yang dihadapi adalah adanya gugatan dari debitur terkait debitur yang tidak beritikab baik saat agunan akan dilakukan eksekusi lelang oleh Bank dikarenakan wanpretasi. debitur yang tidak beritikab baik dengan kredit kolektibilitas macet langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan dengan maksud untuk menghalang halangi atau menunda proses eksekusi agunan dan untuk perkara hukum lainnya semua seputar kredit macet yaitu debitur wanprestasi, lalu bank mengajukan gugatan sederhana pada Pengadilan untuk penyelesaian kredit macet / bermasalah melalui jalur litigasi atau jalur hukum, jadi ke 4 perkara yang telah selesai dalam hal telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu adalah berupa gugatan sederhana yang diajukan pihak Bank atas kredit macet debitur PT BPR Batanghari dan 1 perkara dicabut karena debitur membayar setelah mendapat srt panggilan dari Pengadilan dan untuk perkara yang belum incrah 1 (satu) debitur.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak ada BPR Batanghari Mengalami benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Batanghari

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama Tahun 2023 BPR Batanghari tidak ada memberikan sumbangan baik sosial maupun politik

Nama BPR	: PT. BPR Batanghari
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl Slamet Riyadi No 5A Broni Jambi
Nomor Telepon	: 741671232
Modal Inti BPR	: 10.507.240.680,00
Total Aset BPR	: 57.233.175.421,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,4
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan GCG PT. BPR Batanghari Tahun 2023 mendapatkan hasil dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 1,39 terlihat dari 11 faktor tata kelola yang telah diterapkan PT.BPR Batanghari dengan predikat setiap faktor adalah baik,faktor 1. Tugas dan tanggung jawab direksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan,2.Tugas dan tanggung jawab Komisaris telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan sebagai fungsi pengawasan , Faktor 3. Tugas pelaksanaan fungsi komite pada BPR batanghari tidak membentuk komite karena modal inti masih di bawah 50 M,Faktor 4. Benturan kepentingan BPR Batanghari belum pernah terjadi benturan kepentingan,BPR Batanghari mampu menghindari Transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan,faktor 5 , faktor 6 dan faktor 7 Penerapan fungsi kepatuhan,dan Audit Interen dan eksteran,BPR batanghari telah melaksanakan fungsi kepatuhan setiap unit kerja telah menerapkan budaya patuh pada setiap unit kerja sesuai pada ketentuan yang berlaku baik terhadap ketentuan dan kebijakannya,untuk Audit Interen telah melaksanakan fungsinya dan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan audit membuat rencana kerja,dan independent dari fungsi lain, Audit eksteren telah di laksanakan oleh BPR Batanghari dengan menjalin kerjasama dengan KAP yang telah terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan BPR secara Transparan,untuk faktor 8 dan faktor 9 ,BPR Batanghari telah menerapkan manajemen risiko, yang sifatnya independet tidak ikut dalam operasional ,memiliki kebijakan,setiap unit kerja telah mengetahui dan telah memiliki budaya sadar risiko pekerjaanya, jadi manajemen risiko telah diterapkan oleh masing masing unit kerja sehigga risiko dapat diminimalisir ,dan pengendalian intern berjalan dg baik,sehingga tujuan tata kelola berjalan baik



BANK BATANGHARI

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Jl.Slamet Riyadi No.5A Broni - Jambi Telp.(0741) 671232, 65879 Fax.(0741) 63628

Nomor : 037/BPR BH/DIR –TU//2024/Jb

Jambi, 24 Januari 2024

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth,

Ketua DPP Perbarindo

Di Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada PT.BPR Batanghari Jambi Tahun 2023

Sehubungan dengan POJK Nomor.4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan bank menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) untuk periode Tahun 2023 kepada Asosiasi BPR di Indonesia ,maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola(Good Corporate Governance) pada PT.BPR Batanghari dan sekaligus melampirkan Hasil Penilaian Sendiri(Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT.BPR Batanghari Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingan Bapak kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR BATANGHARI

Wahyuni.S.Sos.MH

Direktur

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Arsip